

**LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA  
TRIWULAN II TAHUN 2023**



**PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KELAS II**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Triwulan II Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Semarang. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Semarang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Semarang dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Triwulan II Tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Juli 2023

Pengadilan Negeri Semarang

Ketua



Ni Made Dewi Sukrani, S.H.  
NIP. 197804282002122006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Rencana Kerja Pelaksanaan .....	4
D. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan .....	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN .....	5
A. Metodologi Survei .....	5
B. Teknik Pengumpulan Data .....	5
C. Teknik Analisa Data .....	5
D. Variabel Pengukuran IPK .....	5
BAB III PROFIL RESPONDEN .....	7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA .....	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	17
DAFTAR PUSTAKA .....	19

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### B. MAKSUD dan TUJUAN

Survey Persepsi Anti Korupsi ini bertujuan untuk mengukur persepsi korupsi pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun Tujuan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang obyektif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna Pengadilan.
2. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pimpinan sebagai dasar menentukan tindaklanjut dan upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengetahui tingkat kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Semarang.

### C. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April - 30 Juni 2023 dengan menetapkan target Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,82 (*tiga koma delapan puluh dua*)

### D. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan survey ini adalah:

1. Tim survey menentukan metode survey.
2. Tim survey membuat instrument berupa kuisisioner.
3. Tim survey memperbanyak kuisisioner, menentukan jadwal pelaksanaan survey.
4. Tim survey melakukan survey sesuai jadwal.
5. Kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim survey.
6. Tim survey menganalisa kuisisioner yang sudah terisi.
7. Tim survey menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif.
8. Hasil analisa diserahkan kepada MR.

## BAB II

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. METODOLOGI SURVEI

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif.

#### B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka.

Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 94 orang responden yang di ambil secara *simple random sampling* terhadap pengguna Pengadilan yang telah mendapatkan pelayanan, terdiri dari:

1. PNS
2. TNI
3. POLRI
4. Swasta
5. Wirausaha
6. Tenaga Kontrak
7. Lainnya

#### C. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.

#### D. VARIABEL PENGUKURAN IPK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang lingkup antara lain:

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh

4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparasi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

**BAB III**  
**PROFIL RESPONDEN**

a. Umur Responden

NO	UMUR	FREKUENSI	(%)
1	17-30	25	47,17
2	31-40	12	22,64
3	41-50	5	9,43
4	51-60	7	13,21
5	61>	4	7,55
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>	<b>100,00</b>

Mayoritas responden ini berumur 17 tahun sampai dengan 30 tahun dengan jumlah 25 orang dari total 53 responden (47,17%).

b. Jenis Kelamin Responden

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	(%)
1	LAKI-LAKI	35	66,04
2	PEREMPUAN	18	33,96
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>	<b>100,00</b>

Mayoritas responden ini berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 35 orang dari total 53 responden (66,04%).

c. Pendidikan Terakhir Responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	(%)
1	Tidak / Belum Sekolah	0	0,00
2	SD	5	9,43
3	SMP	3	5,66
4	SMU	25	47,17
5	Diploma 1	0	0,00
6	Diploma 2	0	0,00
7	Diploma 3	1	1,89
8	S1	15	28,30
9	S2	4	7,55
10	S3	0	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>	<b>100,00</b>



Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah SMU yang berjumlah 25 orang dari total responden 53 orang (47,17%).

d. Pekerjaan Utama Responden

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI	(%)
1	PNS	12	22,64
2	TNI	0	0,00
3	POLRI	0	0,00
4	SWASTA	19	35,85
5	WIRSAUSAHA	7	13,21
6	TENAGA KONTRAK	1	1,89
7	LAINNYA	14	26,42
JUMLAH		53	100,00

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Swasta yaitu 19 orang dari total responden 53 orang (35,85%).

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survey Persepsi Anti Korupsi Unit Pelayanan sebesar 3,83. Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing - masing ruang lingkup pelayanan:

**1. Indikator Manipulasi Peraturan**

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 92,45%. Indeks dapat diartikan bahwa pelayanan petugas Selalu Sesuai Peraturan.

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu Sesuai	4	49	92,45
2	Sering Sesuai	3	3	5,66
3	Jarang Sesuai	2	0	0,00
4	Tidak Sesuai	1	1	1,89
JUMLAH			53	100,00



**2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

Hasil analisis pada ruang lingkup secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	53	100,00
2	Jarang/Pernah	3	0	0,00
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			53	100,00



Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (100,00%) menyatakan memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Semarang secara cepat dan mudah tanpa memberi imbalan kepada petugas.

### 3. Indikator Menjual Pengaruh

Hasil analisis pada Indikator Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	47	88,68
2	Sering	3	1	1,89
3	Jarang	2	3	5,66
4	Tidak Pernah	1	2	3,77
JUMLAH			53	100,00

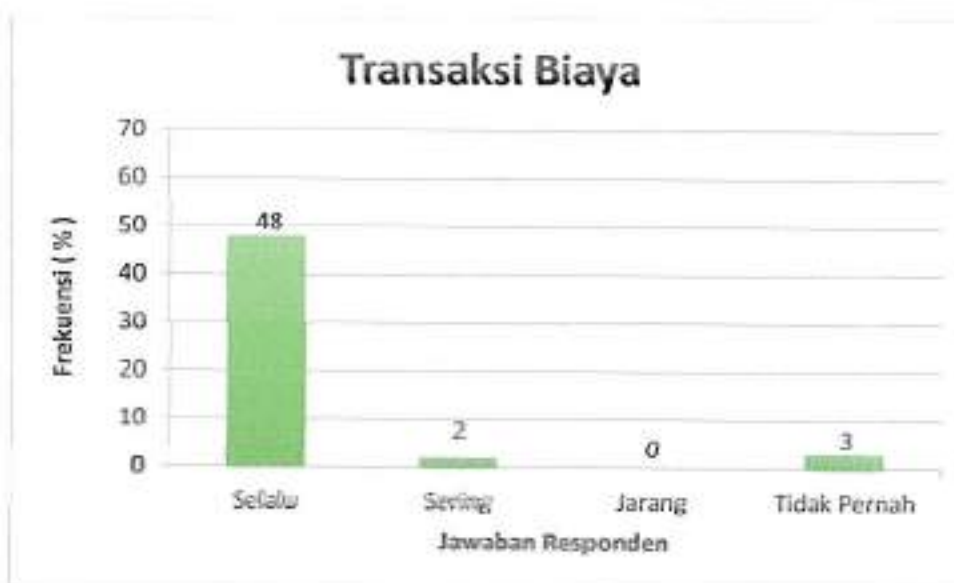


Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (88,68%) menyatakan tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

#### 4. Indikator Transaksi Biaya

Hasil analisis pada Indikator Transaksi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	48	90,57
2	Sering	3	2	3,77
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	3	5,66
JUMLAH			53	100,00

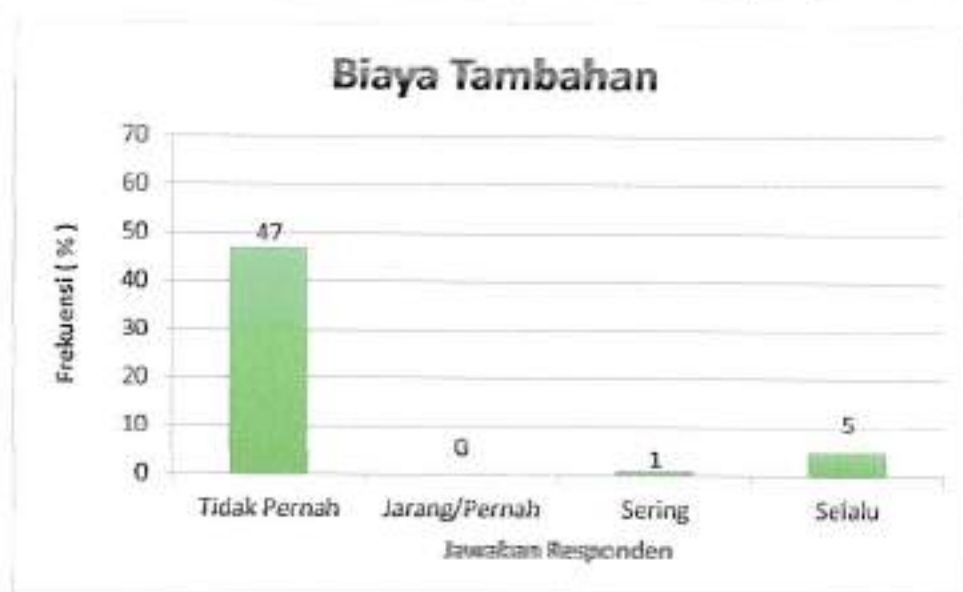


Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (90,57%) menyatakan mudah dalam mendapatkan informasi tentang biaya/tarif baik melalui website ataupun petugas layanan.

## 5. Indikator Biaya Tambahan

Hasil analisis pada ruang lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	47	88,68
2	Jarang/Pernah	3	0	0,00
3	Sering	2	1	1,89
4	Selalu	1	5	9,43
JUMLAH			53	100,00

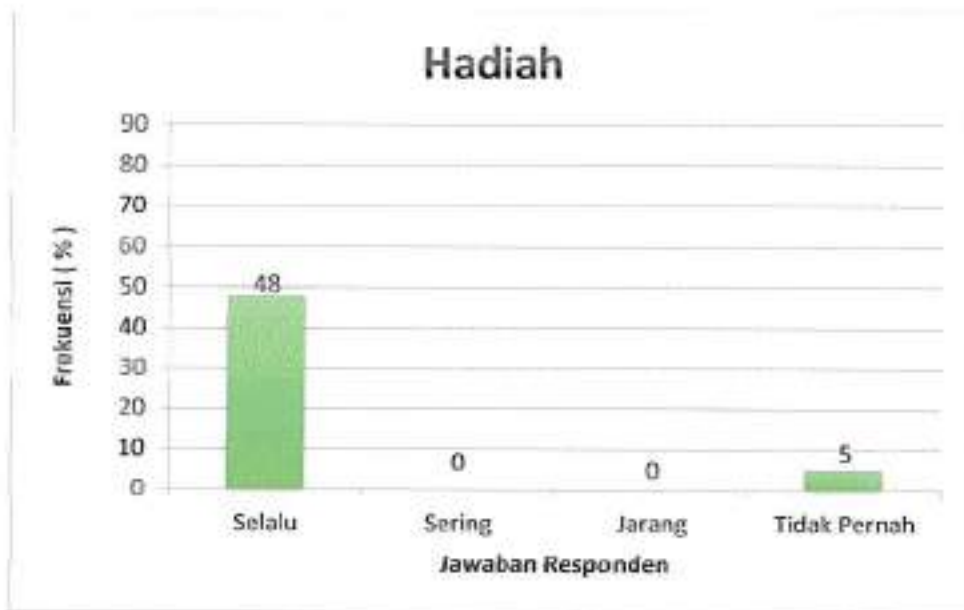


Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (88,68%) menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan.

## 6. Indikator Hadiah

Hasil analisis pada Indikator Hadiah secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Selalu	4	48	90,57
2	Sering	3	0	0,00
3	Jarang	2	0	0,00
4	Tidak Pernah	1	5	9,43
JUMLAH			53	100,00



Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (90,57%) menyatakan tidak pernah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta).

#### 7. Indikator Transparansi Biaya

Hasil analisis pada ruang lingkup Perilaku Pelaksana Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	47	88,68
2	Jarang/Pernah	3	2	3,77
3	Sering	2	1	1,89
4	Selalu	1	3	5,66
JUMLAH			53	100,00

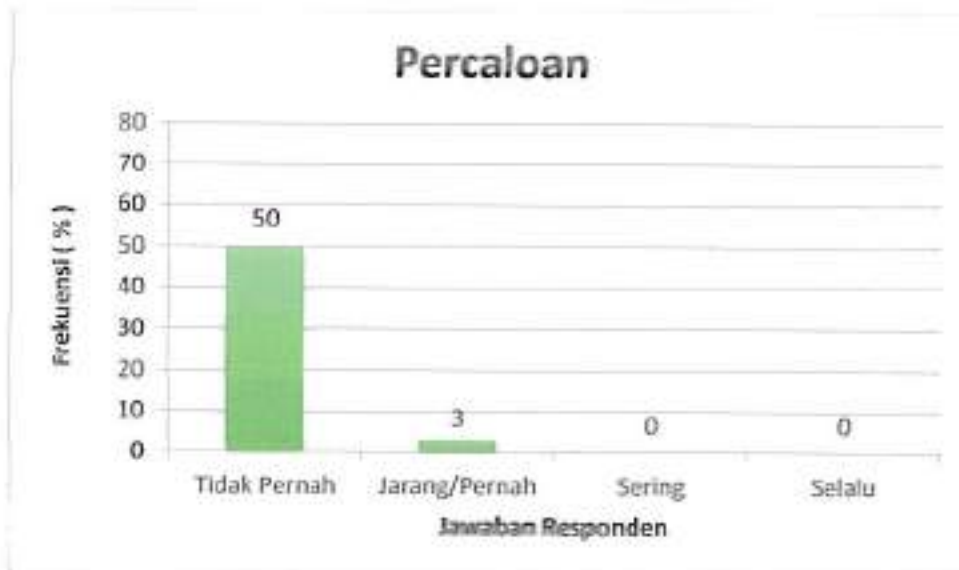


Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (88,68%) menyatakan menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

## 8. Indikator Percaloan

Hasil analisis pada Indikator Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	50	94,34
2	Jarang/Pernah	3	3	5,66
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			53	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (94,34%) tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan.

## 9. Indikator Perbuatan Curang

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	49	92,45
2	Jarang/Pernah	3	1	1,89
3	Sering	2	1	1,89
4	Selalu	1	2	3,77
JUMLAH			53	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (92,45%) responden menyatakan tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan.

#### 10. Indikator Transaksi Rahasia

Hasil analisis pada ruang lingkup Indikator Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	51	96,23
2	Jarang/Pernah	3	2	3,77
3	Sering	2	0	0,00
4	Selalu	1	0	0,00
JUMLAH			53	100,00



Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas (96,23%) responden menyatakan tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan.



Dalam survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan ini terdapat beberapa responden yang memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

- 1 baik ramah dlm pelayanannya
- 2 cukup baik
- 3 sangat baik
- 4 bagus dan baik
- 5 baik
- 6 sangat baik
- 7 saya sangat terkesan atas pelayanannya, semoga tetap menjadi yang terbaik.
- 8 pelayanan di pengadilan negeri Semarang sangat baik dan melayani dengan sepenuh hati
- 9 Layanan yang diberikan sudah sangat baik perlu selalu dipertahankan
- 10 Pengadilan sudah melayani dengan baik
- 11 sangat baik
- 12 sangat amat baik
- 13 sudah cukup baik
- 14 pelayanan sangat ramah dan baik
- 15 untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi
- 16 baik
- 17 pelayanan ramah
- 18 baik dan puas
- 19 mantap
- 20 sangat ramah dan pelayanannya sangat baik
- 21 pelayanan yang diberikan sangat baik dan juga ramah
- 22 melayani pengunjung dgn ramah dan sopan
- 23 Sudah baik
- 24 agar senantiasa memberikan pelayanan terhadap masyarakat kecil yang tidak paham hukum
- 25 jadilah petugas pengadilan yang jujur
- 26 pelayanan sudah baik, tingkatkan sehingga menjadi lebih sempurna
- 27 pertahankan yang sudah baik
- 28 pelayanan sudah bagus, tingkatkan
- 29 menjaga nama baik pengadilan sebagai penegak hukum
- 30 sudah bagus
- 31 pelayanan yang diberikan sudah baik
- 32 pelayanan dari pengadilan sangat baik
- 33 sudah bagus
- 34 baik

- 35 pelayan ramah
- 36 pelayanan sudah sangat baik, petugas ramah
- 37 baik
- 38 Terimakasih atas pelayanan yang efisien
- 39 sudah bagus semoga seluruh layanan dapat dipertahankan
- 40 Terima kasih pengadilan negeri klungkung sudah baik memberikan pelayanan
- 41 Pelayanan cepat dan ramah
- 42 Tetap Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 43 Saya sudah dilayani dengan bagus tetap pertahankan
- 44 Tidak ada, karena pelayanan yang diterima sudah baik memuaskan, terima kasih
- 45 Tetap pertahankan
- 46 Pengadilan Negeri semarapura telah memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan
- 47 Agar selalu berkomitmen memberikan pelayanan yg terbaik untuk masyarakat
- 48 Walaupun sudah bagus tetap tingkatkan
- 49 Semakin ditingkatkan kembali
- 50 Sudah bagus pertahankan
- 51 –
- 52 Pelayanan bagian Pidana sudah baik
- 53 Harus ditingkatkan agar kepuasan masyarakat meningkat

### Nilai Rata-Rata Per Unsur Indikator

No	Unsur Korupsi	Nilai Rata-rata Per Unsur
U1	Manipulasi Peraturan	3,89
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U3	Menjual Pengaruh	3,75
U4	Transaksi Biaya	3,79
U5	Biaya Tambahan	3,68
U6	Hadiah	3,72
U7	Transparasi Biaya	3,75
U8	Perealoan	3,94
U9	Perbuatan Curang	3,83
U10	Transaksi Rahasia	3,96
Indeks Persepsi Anti Korupsi		<b>3,83</b>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN DAN SARAN**

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Triwulan II tahun 2023 adalah 3,83. Hal ini mencerminkan citra yang baik dari masyarakat dan memberikan optimisme semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Semarang.

#### **B. SARAN**

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan harus pula diimbangi dengan menjaga integritas yang tinggi dari segenap aparatur Pengadilan Negeri Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Prof.dr.s.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
2. Prof.dr.s.Sutrisno Hadi, MA. Statistik Jilid 3. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 1977
3. Drs.Ridwan, M.B.A. Dasar – dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Semarang. 2008
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.